

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan

¹Munawwir Yunus Lubis, ²Ibrahim Fikma Edrisy

^{1,2}Universitas Terbuka, Indonesia

¹yunuslubis87@gmail.com, ²ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of financial management carried out by the expenditure treasurer in the Program and Financial Reporting Section at the Class IV Bagansiapiapi Port Authority (KSOP). Good and transparent financial management is crucial to support the smooth operation of government agencies, particularly in managing budgets used for public service programs at the port. The research approach used was descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation studies. The results indicate that the expenditure treasurer at the Class IV Bagansiapiapi Port Authority (KSOP) has managed finances well, in accordance with applicable procedures. Transaction recording, monthly reporting, and budget oversight are carried out with sufficient accuracy. However, obstacles encountered include limited human resources, which leads to a lack of efficiency in the reporting and disbursement processes, and problems with coordination between departments that are not yet fully optimized. Furthermore, the financial reporting process still relies on manual methods, which are prone to recording errors and reporting delays. This study recommends that the Class IV Bagansiapiapi Port Authority (KSOP) implement an electronic-based financial reporting system to improve transparency, efficiency, and accuracy in budget management. In addition, regular training for disbursement treasurers and finance staff is needed to improve competency in financial management and reporting. Furthermore, coordination between relevant departments is needed to ensure more efficient financial management and compliance with applicable regulations.

Keywords: Disbursement Treasurer, Effectiveness, Financial Management, Class IV KSOP, Financial Reporting, Electronic System.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang digunakan untuk program-program terkait pelayanan publik di pelabuhan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi telah mengelola keuangan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencatatan transaksi, pelaporan bulanan, dan pengawasan anggaran dilakukan dengan cukup teliti. Namun, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan kurangnya efisiensi dalam proses pelaporan dan pencairan dana, serta masalah koordinasi antar bagian yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, proses pelaporan keuangan masih bergantung pada metode manual yang berisiko terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan. Penelitian ini merekomendasikan agar KSOP Kelas IV Bagansiapiapi mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pelatihan rutin untuk bendahara pengeluaran dan staff keuangan perlu dilakukan

untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Juga, perlu adanya peningkatan koordinasi antara bagian yang terkait agar pengelolaan keuangan berjalan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Bendahara Pengeluaran, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan, KSOP Kelas IV, Pelaporan Keuangan, Sistem Elektronik.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi (Suhardi, 2021). Efektivitas pengelolaan keuangan ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan waktu, dan akurasi pelaporan (Prasetyo & Wibowo, 2020). Bendahara pengeluaran adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penatausahaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Tugasnya mencakup pencairan dana, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu (Halim, 2022).

Pengelolaan keuangan di instansi pemerintah, terutama di sektor pelayanan publik seperti pelabuhan, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bagansiapiapi adalah instansi pemerintah yang mengatur keselamatan pelayaran, keamanan, dan pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir (Permenhub No. 88 Tahun 2018). Bagian Program dan Pelaporan Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. KSOP Kelas IV Bagansiapiapi sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan, memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan untuk mendukung operasional pelabuhan. Salah satu unit yang terlibat dalam pengelolaan keuangan ini adalah Bagian Program dan Pelaporan Keuangan, yang berfungsi sebagai pengelola dana program dan bertanggung jawab atas pencatatan, pengeluaran, serta pelaporan keuangan secara periodik (Halim, 2022).

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan prosedur pengelolaan keuangan telah ditetapkan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa masalah yang muncul antara lain keterlambatan pelaporan, ketidakakuratan data, dan kurangnya koordinasi antar bagian dalam proses pencairan anggaran. Hal ini berisiko menyebabkan terjadinya penundaan program yang berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal (Prasetyo & Wibowo, 2020). Selain itu, penggunaan sistem pengelolaan keuangan yang masih mengandalkan metode manual di beberapa bagian juga memunculkan potensi kesalahan dalam pencatatan transaksi, yang bisa mengurangi keakuratan laporan keuangan dan meningkatkan potensi kebocoran anggaran. Menurut Kurniawan (2021), penggunaan sistem berbasis elektronik dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan di instansi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efektivitas pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi bendahara, sistem administrasi keuangan, serta pengawasan internal (Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2020). Studi terbaru menyatakan bahwa implementasi pelaporan keuangan berbasis elektronik dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi (Kurniawan, 2021). Penelitian terbaru menegaskan bahwa sertifikasi dan kompetensi teknis bendahara berperan penting dalam kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Bendahara yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang regulasi keuangan, pencatatan transaksi, dan aplikasi sistem pelaporan mampu meningkatkan akurasi laporan keuangan serta mempercepat proses

pertanggungjawaban. Studi Asamil dan Arif (2024) juga menegaskan bahwa kompetensi bendahara secara signifikan berpengaruh terhadap mutu laporan keuangan publik di sektor pendidikan daerah.

Sistem administrasi keuangan yang efektif, terutama dengan adopsi pelaporan berbasis elektronik, telah terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi instansi pemerintah. Penelitian Suhendro (2024) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di daerah. Selain itu, digitalisasi keuangan di tingkat daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh Rahman (2022) dan Syafitri (2025), berpengaruh terhadap efisiensi belanja publik dengan mendorong ketepatan waktu realisasi anggaran. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai mekanisme pengawas kualitas pengelolaan keuangan. Implementasi SPIP yang berbasis pada Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 menekankan pentingnya aktivitas pengendalian internal di seluruh level instansi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Lestari (2025) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang kuat, jika didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, mampu meningkatkan akurasi pelaporan dan menekan risiko penyimpangan keuangan.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan oleh bendahara pengeluaran di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi, khususnya pada bagian program dan pelaporan keuangan. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan agar pengelolaan anggaran dapat lebih efisien, akurat, dan tepat waktu (Hidayat, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah yang terus berupaya meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dalam setiap instansi pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pengelola keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi serta memberikan kontribusi bagi studi tentang pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya di sektor pelayanan publik yang mengelola anggaran negara. Penelitian ini berjudul **"Efektivitas Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi"**

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan pemahaman mengenai efektivitas pengelolaan keuangan oleh bendahara pengeluaran.

Penelitian ini dilaksanakan pada Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2025, dengan pertimbangan untuk melakukan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap efektivitas pengelolaan keuangan yang diterapkan Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi. Teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara langsung mengamati iMengamati langsung kegiatan pengelolaan keuangan, mulai dari pencairan dana, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan pada agian Program dan Pelaporan Keuangan

di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan yang diterapkan Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi.

2. Wawancara

Melakukan wawancara mendalam dengan bendahara pengeluaran, staf keuangan, dan kepala bagian untuk mendapatkan informasi terkait proses dan kendala pengelolaan keuangan.

3. Studi kepustakaan

Memeriksa literatur dalam kerangka diskusi penelitian adalah bagaimana penelitian literatur dilakukan. Menggunakan teori yang dikumpulkan dari literatur terkait sebagai dasar untuk mengatasi masalah yang sedang dipertimbangkan oleh peneliti adalah tujuan dari tinjauan literatur

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan Keuangan yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi.

Pengelolaan keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi pada dasarnya telah berjalan sesuai ketentuan perbendaharaan, meskipun sebagian proses masih dilakukan secara manual. Sistem pencatatan tradisional ini mengikuti ketentuan akuntabilitas keuangan pemerintah, namun sering menimbulkan keterlambatan pengolahan data dan pelaporan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan. Dengan demikian, meskipun mekanisme manual masih dapat berjalan, penerapan sistem berbasis teknologi akan meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran telah melaksanakan fungsi penatausahaan secara konsisten. Dokumen transaksi, Surat Perintah Membayar (SPM), serta pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) tersusun dengan rapi. Selain itu, penggunaan aplikasi SAKTI turut meningkatkan ketelitian pencatatan, meskipun masih ada pegawai yang memerlukan pelatihan tambahan untuk mengoperasikannya secara optimal. Secara umum, kesalahan administrasi yang ditemukan sangat rendah dan tidak terdapat selisih kas yang berarti.

Pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) juga dilakukan tepat waktu, dan hasil rekonsiliasi menunjukkan kesesuaian antara saldo kas, BKU, dan data aplikasi. Temuan auditor internal sebagian besar bersifat administratif terkait kelengkapan lampiran, tanpa memengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa proses pelaporan pada KSOP telah memenuhi prinsip akuntabilitas yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan pada KSOP Kelas IV Bagansiapiapi tergolong efektif. Ketepatan waktu pelaporan, minimnya kesalahan pencatatan, serta kepatuhan terhadap regulasi menunjukkan bahwa fungsi bendahara dijalankan dengan baik. Efektivitas ini turut dipengaruhi oleh kompetensi teknis bendahara, khususnya pemahaman regulasi dan kemampuan menyusun laporan, sebagaimana didukung oleh penelitian Sari & Rahman (2021) dan Mahardika & Dewi (2022). Namun demikian, ketidakmerataan kemampuan teknologi antarpegawai masih menjadi faktor penghambat yang perlu perhatian.

Selain kompetensi individu, pengendalian intern yang kuat juga berperan penting. Prosedur otorisasi, pemeriksaan kas, dan rekonsiliasi bulanan berjalan konsisten dan mampu meminimalkan risiko penyimpangan. Temuan ini selaras dengan penelitian

sebelumnya yang menegaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan kas dan pencegahan fraud (Utami & Hartono, 2020). Meskipun tergolong efektif, penelitian juga menemukan beberapa tantangan, seperti keterlambatan penyampaian dokumen dari bagian teknis, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta ketergantungan pada pegawai tertentu yang memiliki kompetensi lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi lintas-unit yang lebih optimal, sebagaimana ditegaskan Putri & Suwandi (2023).

Kendala yang Dihadapi Bendahara Pengeluaran Dalam Mengelola Keuangan.

Penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi telah melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib sesuai ketentuan. Prosedur pencatatan transaksi, pencairan dana, dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara rutin dan mengikuti pedoman yang berlaku. Setiap pengeluaran dicatat dengan rapi dan dilaporkan tepat pada siklus pelaporan. Hal ini menandakan bahwa tanggung jawab bendahara telah dijalankan dengan baik, sebagaimana ditegaskan Halim (2022). Namun demikian, ketepatan waktu pelaporan masih menjadi kendala utama. Keterlambatan sering terjadi akibat terbatasnya sumber daya manusia serta koordinasi yang belum optimal antarunit kerja, sejalan dengan temuan Prasetyo & Wibowo (2020) yang menekankan pentingnya kapasitas SDM dan koordinasi dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan.

Penelitian juga mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi informasi belum optimal. Beberapa proses pengelolaan, seperti verifikasi data dan pengolahan laporan, masih dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan memperlambat proses penyusunan laporan keuangan. Penggunaan sistem berbasis elektronik dinilai dapat meningkatkan ketelitian dan efisiensi, karena memungkinkan pemutakhiran data secara real-time dan mengurangi potensi human error, sesuai rekomendasi Kurniawan (2021). Walaupun upaya transparansi sudah terlihat, sistem pelaporan yang lebih terintegrasi masih diperlukan untuk mendukung akuntabilitas yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, bendahara juga dihadapkan pada berbagai risiko, seperti risiko likuiditas, operasional, serta kepatuhan. Risiko tersebut perlu dikelola melalui sistem manajemen risiko yang terstruktur, meliputi identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap kemungkinan penyimpangan. Halim (2022) menekankan bahwa pengelolaan risiko likuiditas dapat dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan operasional dan memantau arus kas secara berkala. Risiko operasional dan kepatuhan dapat diminimalkan melalui pemenuhan SOP dan peningkatan kualitas pengawasan internal. Efektivitas pengelolaan keuangan juga dipengaruhi oleh kebijakan anggaran yang berlaku di KSOP. Perubahan atau keterlambatan pencairan anggaran dari instansi di atasnya kerap menimbulkan ketidakpastian, yang berdampak pada penjadwalan kegiatan dan pelaksanaan program. Hal ini menyulitkan bendahara dalam merencanakan pengeluaran secara optimal. Prasetyo & Wibowo (2020) merekomendasikan penyusunan anggaran yang lebih realistis, peningkatan komunikasi antara unit perencanaan dan bendahara, serta penerapan anggaran berbasis kinerja agar penggunaan dana selaras dengan hasil yang ingin dicapai. Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan anggaran telah mengikuti prosedur yang ada, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi informasi, dan penguatan koordinasi menjadi aspek penting yang perlu diperbaiki untuk mendukung pengelolaan keuangan yang semakin efektif.

Strategi yang Diterapkan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan pada KSOP Kelas IV Bagansiapiapi masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kompetensi sumber daya manusia, koordinasi antarunit, pemanfaatan teknologi, serta kualitas pengawasan internal. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi bendahara pengeluaran dan staf keuangan telah dilakukan, namun hasilnya belum optimal karena proses pengelolaan anggaran masih bergantung pada sistem manual. Hal ini menyebabkan pencatatan dan pelaporan keuangan memerlukan waktu lebih lama dan berisiko menimbulkan kesalahan. Temuan ini sejalan dengan Sari dan Nugroho (2020) yang menegaskan bahwa kapasitas aparatur berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan anggaran. Penggunaan sistem akuntansi berbasis elektronik direkomendasikan sebagai solusi untuk memperbaiki efektivitas dan akurasi pelaporan. Sistem digital dapat mengurangi human error, mempercepat verifikasi data, serta mempermudah proses audit. Penelitian Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem keuangan di instansi pemerintah meningkatkan transparansi dan efisiensi penganggaran. Selain itu, implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) juga dinilai relevan karena mampu mengintegrasikan seluruh proses keuangan dari perencanaan hingga pelaporan, sebagaimana dibuktikan oleh Sinaga (2022).

Dari sisi koordinasi internal, penelitian menemukan adanya ketidaksinkronan antara bagian program, keuangan, dan pelaporan. Ketidakharmonisan ini menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran serta perbedaan interpretasi terhadap prosedur. Hidayat (2021) menekankan bahwa koordinasi yang lemah merupakan salah satu penyebab utama tidak efektifnya pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah. Untuk itu, forum koordinasi rutin antarunit sangat diperlukan untuk memastikan keseragaman pelaksanaan prosedur. Pengawasan internal juga masih terbatas akibat kurangnya petugas yang bertanggung jawab dalam memantau setiap transaksi. Pengawasan yang lemah meningkatkan potensi kesalahan pencatatan atau penyimpangan anggaran. Prasetyo dan Wibowo (2020) menegaskan bahwa kualitas pengawasan internal yang baik berperan penting dalam mengurangi risiko ketidaksesuaian keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan audit internal secara berkala dan penggunaan sistem monitoring digital untuk memperkuat kontrol internal. Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, ditemukan bahwa penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya konsisten antarunit. Untuk meningkatkan transparansi, penggunaan sistem pelaporan berbasis elektronik dinilai penting karena dapat menyediakan informasi yang lebih akurat, cepat diakses, dan mudah diaudit. Hal ini diperkuat oleh temuan Abdullah dan Rahmawati (2020) yang menunjukkan bahwa digitalisasi laporan keuangan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi dapat ditingkatkan melalui digitalisasi sistem, penguatan koordinasi, intensifikasi pengawasan internal, dan peningkatan kompetensi aparatur.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan oleh bendahara pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan Keuangan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Meskipun demikian, efektivitas pengelolaan keuangan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterlambatan dalam pelaporan, ketidakakuratan data, dan kurangnya koordinasi antar bagian yang mengelola anggaran. Kendala utama yang

ditemukan adalah penggunaan sistem manual dalam pelaporan keuangan yang mengarah pada potensi kesalahan pencatatan dan keterlambatan penyampaian laporan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sistem berbasis elektronik dalam pelaporan keuangan dapat memperbaiki transparansi, efisiensi, dan akurasi data keuangan. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif bagi bendahara pengeluaran dan peningkatan koordinasi antar unit kerja juga menjadi faktor penting dalam meminimalisir kesalahan dan mempercepat proses pencairan serta pelaporan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar KSOP Kelas IV Bagansiapiapi segera beralih ke sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada metode manual. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam proses pelaporan dan pencatatan transaksi keuangan.
2. Pelatihan rutin bagi bendahara pengeluaran dan staff keuangan mengenai sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan yang lebih modern serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengelola anggaran secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk memastikan kelancaran proses pengelolaan keuangan, perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih baik antara bagian program, keuangan, dan pelaporan. Pertemuan rutin antar bagian sangat disarankan untuk membahas permasalahan yang muncul, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
4. Perlu dilakukan evaluasi terhadap prosedur pengelolaan keuangan yang ada agar lebih disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional instansi. Penyempurnaan prosedur ini akan membantu mempercepat alur pengelolaan anggaran, dari perencanaan hingga pelaporan, serta mengurangi potensi kesalahan administratif.

Daftar Pustaka

- Halim, R. (2022). *Manajemen Keuangan Instansi Pemerintah: Studi Kasus KSOP Bagansiapiapi*. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 101-115.
- Hidayat, R. (2021). *Manajemen Keamanan di Lembaga Masyarakat: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Keamanan dan Ketertiban, 7(3), 120-130.
- Hidayat, R. (2021). *Manajemen Keamanan di Lembaga Masyarakat: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Keamanan dan Ketertiban, 7(3), 120-130
- Kurniawan, T. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik di Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 14(1), 55-70.
- Kurniawan, T. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Berbasis Elektronik di Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 14(1), 55-70.
- Lestari, A. E. (2025). Pengaruh pengawasan internal dan kompetensi SDM terhadap efektivitas keuangan pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Finansial Modern*, 4(1), 25-38.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 tentang Akuntabilitas Keuangan Negara.

- Prasetyo, A., & Wibowo, S. (2020). *Tantangan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah*. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 6(3), 77-90.
- Prasetyo, A., & Wibowo, S. (2020). *Tantangan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah*. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi*, 6(3), 77-90.
- Rahman, A. Z. (2022). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Humanika*, 10(2), 150-160.
- Silmi, R. (2024). Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah di Badan Pendapatan Daerah. *Jurnal Moneter*, 20(4), 210-225.
- Suhendro, S. (2024). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 15(3), 120-135.
- Syafitri, E. (2025). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(1), 45-59.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Wulandari, N. K. (2025). Peran kompetensi dan profesionalisme staf bendahara terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 2(2), 30-45.